



## **Peranan Palang Merah Indonesia Cabang Yogyakarta pada Masa Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta, 1948-1949**

**Muchamad Triyanto,<sup>1\*</sup> Bambang Eka Saputra,<sup>2</sup> Abdul Hafiz,<sup>2</sup> Zidni,<sup>2</sup>  
Suhupawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Email: triyantomuhamad924@gmail.com, pakdebambangdhp@gmail.com,  
hafizfistra68@gmail.com, zidnizidni92@gmail.com, suhupawati@gmail.com

\*Korespondensi

**Article History:** Received: 10-09-2024, Revised: 27-12-2024, Accepted: 28-12-2024, Published: 31-12-2024

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran penting Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Yogyakarta selama masa Perang Kemerdekaan II, khususnya pada periode 1948-1949 ketika Yogyakarta menjadi salah satu pusat pertempuran dan agresi militer Belanda. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat pada saat itu bangsa Indonesia sedang berada di puncak perjuangan mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Khususnya, agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 menimbulkan kekacauan besar di Yogyakarta, baik bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun masyarakat sipil. Melalui metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini mengungkapkan kontribusi nyata PMI dalam misi kemanusiaan selama konflik berlangsung. PMI Cabang Yogyakarta memiliki peran signifikan dalam memberikan bantuan medis, perawatan korban luka, serta mengorganisir dapur umum untuk para pejuang dan masyarakat yang terdampak oleh perang. PMI tidak hanya membantu TNI di medan pertempuran, tetapi juga masyarakat sipil yang menjadi korban serangan Belanda. Melalui perannya, PMI turut berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang krusial selama masa perang, menjadikan mereka bagian integral dari perjuangan bangsa.

### **Kata Kunci:**

Palang Merah Indonesia; peranan; perang kemerdekaan; Yogyakarta

### **Abstract**

This study aims to reveal the crucial role of the Yogyakarta Branch of the Indonesian Red Cross (PMI) during the Second War of Independence, particularly in the 1948-1949 period when Yogyakarta became one of the centers of battle and Dutch military aggression. This research is highly relevant, considering that during this period, the Indonesian nation was at the height of its struggle to defend its independence, which had been proclaimed on August 17, 1945. Specifically, the second military aggression launched by the Dutch on December 19, 1948, caused widespread chaos in Yogyakarta, affecting both the Indonesian National Army (TNI) and civilians. Using historical research methods, which include the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study reveals the significant contribution of PMI in its humanitarian mission during the conflict. The Yogyakarta Branch of PMI played a vital role in providing medical aid, treating wounded

victims, and organizing public kitchens for fighters and civilians affected by the war. PMI not only assisted the TNI on the battlefield but also supported civilians who became victims of Dutch attacks. Through its efforts, PMI contributed to defending Indonesia's independence by carrying out critical humanitarian activities during the war, making them an integral part of the nation's struggle.

**Keywords:**

Indonesian Red Cross; role; war of independence; Yogyakarta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Periode revolusi fisik di Indonesia yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1950 merupakan salah satu masa krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Masalah yang menjadi sorotan utama pada masa tersebut adalah upaya rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda. Dua kali agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, yakni pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948, menjadi bukti nyata bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan belum selesai meskipun kemerdekaan telah diklaim secara *de jure*.

Dalam konteks penelitian terdahulu, banyak studi yang telah membahas secara komprehensif mengenai dampak dari Agresi Militer Belanda, baik dari segi politik maupun militer, seperti buku terbitan PMI (1953). Ada juga karya Karmaputra, (1976) tentang sejarah terbentuknya Palang Merah Internasional maupun Palang Merah Indonesia. Buku Matia Maidjah (1976) tentang kisah dokter Satrio salah seorang anggota PMI yang bertugas pada masa perang kemerdekaan di daerah Banten. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya fokus pada tokoh-tokoh besar seperti Jenderal Soedirman yang memimpin perang gerilya atau pada peristiwa-peristiwa besar seperti pertempuran di Yogyakarta (Tardjo, 1985). Namun, terdapat riset gap yang belum banyak dijelajahi, khususnya terkait peran Palang Merah Indonesia (PMI) yang bertindak di lapangan pada saat-saat kritis, terutama dalam memberikan pertolongan pertama dan mengorganisir bantuan medis untuk korban perang, baik di kalangan pejuang maupun masyarakat sipil.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap peran PMI Cabang Yogyakarta selama Perang Kemerdekaan Kedua (1948-1949). Meskipun PMI sudah dikenal sebagai organisasi yang berperan penting dalam kemanusiaan, kontribusi konkretnya dalam konteks revolusi fisik ini masih kurang terdokumentasi secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan PMI dalam membantu perjuangan kemerdekaan melalui penyediaan layanan medis dan logistik di Yogyakarta, termasuk bagaimana mereka mendirikan pos pertolongan pertama kecelakaan (PPPK) di garis depan dan mengorganisir dapur umum yang didukung oleh masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menyoroti aspek kemanusiaan yang sering terlewatkan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran PMI sebagai

bagian integral dari perjuangan kemerdekaan, yang tidak hanya bertempur di medan pertempuran, tetapi juga di bidang pelayanan kesehatan dan logistik bagi para pejuang dan rakyat yang terdampak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi generasi mendatang serta menginspirasi pengembangan organisasi PMI dalam perannya menghadapi tantangan kemanusiaan di masa mendatang.

## Metode

Tahapan dalam metode sejarah digunakan adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2015). Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan dari sumber-sumber primer seperti arsip, dan wawancara dengan mantan anggota PMI yang terlibat pada masa Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta, sumber sekunder seperti buku dan artikel jurnal yang membahas terkait PMI. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diseleksi, dikritisi, dan dirangkai dalam hubungan antara fakta-fakta sehingga menghasilkan pemahaman yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif dan naratif.

## Hasil dan Pembahasan

### PMI Cabang Yogyakarta pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di Yogyakarta 1948-1949

Pada tanggal 19 Desember 1945 Belanda mengadakan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta berhasil direbut dan diduduki. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berhasil ditawan dan untuk selanjutnya diasingkan ke Bangka. Akan tetapi, sebelum peristiwa itu pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat (Dita, Wahyuni, & Purnomo, 2022).

Instruksi itu tidak sampai kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, tetapi dengan kebijaksanaannya sendiri beserta kawan-kawannya yang berada di Sumatera, mereka mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di samping itu mandat yang diberikan kepada MR. Syafruddin Prawiranegara, mandat serupa juga diberikan kepada Dr. Soedarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis yang berada di India untuk membentuk *Exile Gouvernement Republic of Indonesia* di New Delhi jika usaha pembentukan PDRI di Sumatera gagal (Alit, Pramatha, Darman, & Wika, 2021).

Panglima besar Jenderal Soedirman yang pada waktu itu, beliau sedang dalam keadaan sakit, berhasil mengundurkan diri ke luar kota untuk memimpin perang gerilya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat dengan menggunakan tandu melewati pantai selatan, sampailah Jenderal Soedirman didaerah Gunung Lawu. Di daerah inilah Jenderal Soedirman mengatur siasat dan memimpin perang gerilya hingga saat kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.

Belanda mencoba mematahkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia dengan menduduki Yogyakarta dan berusaha keras untuk mengajak kerjasama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Belanda berkali-kali mengirimkan utusan-utusannya untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seperti Sultan Hamid II, Berkhuis, Residen Stok, Kolonel Val Langen, dan Prof. Dr. Husein Djajadingrat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan alasan sakit selalu menolak untuk menemui mereka dan menugaskan saudaranya GBPH

Prabuningrat agar menolah para utusan Belanda itu. Belanda tidak menangkap Sri Sultan Hamengkubuwono IX karena mempunyai dua alasan. Pertama, Belanda mengharapkan beliau mau diajak kerjasama dengan dijanjikan kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Kedua, Belanda berpendapat dengan menangkap Sri Sultan, seorang raja yang dicintai rakyatnya, akan lebih mempersulit tentara pendudukan di Yogyakarta. Ajakan Belanda untuk bekera sama di tolak oleh Sri Sultan, beliau memilih ditangkap atau binasa daripada berkhianat pada RI. Tindakan dan sikap Sri Sultan yang demikian dapat membangkitkan semangat para pejuang yang sedang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Negara RI.

Agresi Militer Belanda yang kedua atas kota Yogyakarta dan wilayah RI lainnya itu mengakibatkan peran kemerdekaan antara rakyat Indonesia dengan tentara Belanda yang terjadi di berbagai daerah. Pada waktu terjadi pertempuran dengan tentara Belanda mengakibatkan banyak korban yang jatuh, sehingga dibutuhkan pos-pos kesehatan untuk menolong dan merawat korban perang. Sehubungan dengan keluarnya maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 1945 tentang perawatan kesehatan bagi para tentara yang sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, khususnya para dokter yang dibantu oleh beberapa mantri kesehatan, jururawat, dari rumah sakit Djawatan Kesehatan Tentara (DKT), Bethesda, tenaga-tenaga kesehatan dari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) serta PMI yang dibantu oleh teanga-teanga yang terdiri dari pemuda-pemudi, mahasiswa, pelajar, yang dapat menyelenggarakan perawatan dan pengobatan pada penduduk akibat korban perang, mereka pada masa perang kemerdekaan kedua meningkatkan pengabdian dan partisipasinya dalam perjuangan (TNI AU, 1984).

TNI di dalam melakukan serangan balasan terhadap kedudukan tentara Belanda dilakukan dengan cara perang gerilya karena TNI menghindari *clash frontal*. Hal ini sesuai dengan intruksi Jenderal Soedirman, maka digerakkanlah perang gerilya, taktik *hit and run* atau pukul dan lari, yaitu menyerang tentara Belanda sewaktu mereka lengah dan diperkirakan kekuatannya kecil. Kemudian bergerak mundur mencari perlindungan di tengah-tengah rakyat sewaktu diserang tentara Belanda yang kekuatan militernya lebih besar. Selama gerilya TNI secara nyata manunggal dengan rakyat: hidup ditengah-tengah rakyat, tidur bersama rakyat, makan bersama rakyat, dan mati untuk rakyat.

Para petani memegang peranan penting sebab selain sebagai tempat penampungan para penguungsi dari kota sebagai sumber logistik para pejuang. Selain itu petani juga tidak jarang menjadi pembantu intelijen bagi para pejuang. Keadaan yang serba sulit ditambah terjadinya serangan-serangan oleh pihak tentara Belanda membuat rakyat sangat menderita. Akan tetapi bagaimanapun juga jiwa dan semangat rakyat Yogyakarta pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya tetap memiliki jiwa dan semangat republik serta tetap setia untuk menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sebagai gambaran beberapa jumlah kerugian yang diderita rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta selama pendudukan tentara Belanda dari tanggal 19 Desember 1949 sampai dengan tentara Belanda meninggalkan kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 1949, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kerugian Rakyat

No.	Tempat	Mati	Luka	Hilang	Harta Benda Seharga (Rp.)
1	Haminte Kota Yogyakarta	519	119	90	75.445.552
2	Kab. Bantul	1055	160	221	67.391.209
3	Kab. Sleman	923	395	224	181.868.414
4	Kab. G. Kidul	157	30	1	8.400.765
5	Kab. Kl. Progo	57	24	3	1.775.530
6	Kab. Adikarto	7	4	-	804.980
	<b>Jumlah</b>	<b>2718</b>	<b>736</b>	<b>539</b>	<b>252.684.430</b>

Sumber: Diolah dari Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 25 Januari 1985; Surat kabar harian Nasional, 9 Djuni 1949; Surat Kabar Harian Nasional, 10 Djuni 1949; Surat Kabar Harian Nasional, 27 September 1949; Surat Kabar Harian Nasional, 15 Oktober 1949; Surat Kabar Harian Nasional, 4 November 1949; Surat Kabar Harian Nasional, 21 Desember 1949; Surat Kabar Harian Al Djihad, 4 April 1946.

Pada masa perang kemerdekaan kedua, PMI turut peran aktif dalam memberikan pertolongan dan perawatan bagi korban perang. Hal itu sesuai dengan tujuan PMI dibentuk untuk meringankan penderitaan umat manusia baik pada masa damai maupun dalam pertikaian bersenjata tanpa membeda-bedakan bangsa, politik, golongan, agama, maupun kepercayaan. Untuk itu, PMI Cabang Yogyakarta pada masa Perang Kemerdekaan II mendirikan klinik-klinik atau pos-pos kesehatan PMI di berbagai daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada korban perang (Susanto, 1985).

TNI dengan mendapat dukungan rakyat dan para *pamong prodjo* di seluruh kabupaten di Yogyakarta, pada saat itu Letnan Kolonen Soeharto menjabat Komando Brigade 10 segera mengkonsolidasikan pasukan dan menyusun kekuatan dalam sektor gerilya. Kemudian disusunlah staf komando Wehrkreise III beserta sub-sub Wehrkreise. Pos komanda Wehrkreise III berada di Segorouoso dan dalam usaha memberikan pertolongan kesehatan bagi pejuang yang sakit, di pos komando Wehrkreise III didirikan poli klinik PMI yang dipimpin oleh dr. Irsan dan dibantu oleh dua orang perawat dari rumah sakit Bethesda. Kedua jururawat tersebut bernama soemiati dan Sri Redjeki. Poliklinik PMI di Segoroyoso dapat menampung lebih kurang untuk 40 pasien. Selain itu di setiap pasukan yang dibentuk dipersiapkan tenaga-tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang jatuh (Susanto, S. 1985; Ki Nayono, 1976).

Setelah selesai mengkonsolidasikan pasukan dan menata organisasi perlawanan gerilya, maka dimulailah penyerangan balasan terhadap kedudukan tentara belanda di dalam kota Yogyakarta. Serangan dilakukan dengan cara kecil-kecilan maupun serangan umum. Serangan umum pertama dilakukan pada tanggal 29 Desember 1948, kemudian serangan kedua pada tanggal 7 Januari 1949, serangan ketiga pada tanggal 16 Januari 1959, serangan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 1949 dan pada tanggal 1 Maret 1949 TNI telah beberapa kali melakukan serangan terhadap kedudukan tentara Belanda di kota Yogyakarta. Diantara serangan umum yang dilakukan oleh TNI pada waktu itu yang paling besar hasilnya adalah serangan umum yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949.

Serangan umum 1 Maret 1949 itu dipersiapkan dengan teliti. Sebelum serangan dimulai telah diselundupkan prajurit-prajurit ke dalam kota. Satu batalyon ditugaskan menduduki Lapangan Udara Maguwo, sedangkan kesatuan-kesatuan lainnya menyerang dari berbagai penjuru kota dan disamping itu dipasang ranjau-ranjau untuk mencegah atau menghambat pasukan bantuan tentara Belanda.

Pada tanggal 1 Maret 1949 tepat pada pukul 06.00 waktu setempat ketika bunyi sirine menandakan berakhirnya jam malam, pasukan gerilya memasuki kota Yogyakarta. Pejuang-pejuang memakai daun kelapa muda (janur) yang digantungkan di bahu sebagai tanda pengenal. Sasaran yang telah ditentukan ialah tempat markas tentara Belanda, antara lain markas tentara Benteng Vredenburg Gedung Agung, bekas Markas Besar Polisi Negara, Stasiun Kereta Api, Hotel Garuda, maupun markas atau pos-pos tentara Belanda lainnya mendapat serangan total dan serentak. Serangan dapat berjalan dengan lancar, pusat kota dapat diduduki. Pabrik amunisi Watson dapat direbut dan lima ton amunisi dan senjata-senjata ringan serta satu tank kecil dapat dirampas oleh TNI.

Pada tengah hari bantuan tentara Belanda dari Semarang memasuki kota Yogyakarta. Pasukan tentara Belanda dipimpin oleh Kolonen Van Zanten, Komando Brigade Gajah Merah. Sesuai dengan taktik yang telah ditentukan oleh komandan Serangan umum, Letnan Kolonel Soeharto, TNI mundur setelah bantuan tentara Belanda datang dengan kekuatan lebih besar. TNI mundur meninggalkan kota kembali ke pangkalan semua. Serangan umum yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 telah berhasil memberikan dukungan kuat pada perjuangan diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan membantah propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI didukung oleh beberapa faktor, termasuk faktor kesehatan (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Adanya serangan belasan dari TNI terhadap kedudukan tentara Belanda yang berada di dalam kota mengakibatkan banyak korban yang berjatuh sehingga dibutuhkan pos-pos kesehatan untuk menolong dan merawat korban perang. PMI Cabang Yogyakarta dalam hal ini turut berperan aktif untuk memberikan pertolongan dan perawatan pada korban perang (PMI Cabang Yogyakarta, 1946). Selain mengikutsertakan anggota-anggotanya di dalam kesatuan-kesatuan bersenjata sebagai tenaga kesehatan, PMI Cabang Yogyakarta membentuk PMI ranting sebagai pembantu PMI Cabang yang didirikan di tingkat daerah MPP. Di samping itu PMI Cabang Yogyakarta juga mendirikan pos-pos kesehatan PMI di tempat-tempat yang dianggap strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Pos-pos PMI Ranting yang ada di dalam kota Yogyakarta antara lain: Pos PMI Ranting Ngampilan, Pos PMI Ranting Darurejan, Pos PMI Ranting Gedong Tengen, Pos PMI Ranting Worourajan, Pos PMI Ranting Mantrijeron, Pos PMI Ranting Jetis, Pos PMI Ranting Mergangsan, Pos PMI Ranting Tegalrejo, Pos PMI Ranting Gondomanan, Pos PMI Ranting Pakualaman, Pos PMI Ranting Kraton, Pos PMI Ranting Gondokusuman, Pos PMI Ranting Kotagede. Selain pos-pos PMI Ranting tersebut PMI Cabang Yogyakarta juga mendirikan pos-pos PMI di tempat-tempat strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain. Pos PMI Ngabean, Pos PMI Ketanggungan, Pos PMI Kadipiro, Pos PMI Pugeran, Pos PMI Mangkuyudan, Pos PMI Patangpuluhan,

Pos PMI Kintelan, Pos PMI Kauman, Pos PMI Baciro, Pos PMI Sindunegara dan Pos PMI Bintaran (PMI, 1989)

PMI Cabang Yogyakarta di dalam memberikan pertolongan dan perawatan kesehatan kepada korban peran bekerjasama dengan Jawatahn Kesehatan, Rumah Sakit, Pemerintah Daerah, maupun dengan Jawatan Militer, sedangkan tenaga-tenaga MC dihimpun dari pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa yang tidak mengambil bagian dalam kesatuan bersenjata. Pada masa perang kemerdekaan, regu-regu MC digabungkan ke dalam kesatuan bersenjata. Pada masa kemerdekaan, regu-regu MC yang digabungkan ke dalam Komando Militer Kota (KMK) dipimpin oleh dr. Soekonto. Apabila KMK memerlukan tenaga-tenaga kesehatan, maka KMK dapat mengambil dari tenaga-tenaga PMI.

Dengan adanya agresi militer Belanda itu rakyat merasa terpenggil untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran rakyat dalam ikut serta bela negara itu sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1045 yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam Pembelaan Negara".

Adapun keikutsertaan rakyat sekali-kali bukan karena paksaan, melainkan berdasarkan kesukarelaan karena merasa memiliki dan konsekuensinya ikut bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Di samping TNI sebagai angkatan perang, pada waktu itu dalam perjuangan bersenjata, rakyat mendirikan badan-badan kelaskaran sebagai peran sertanya. Kegiatan wanita dalam perjuangan pada umumnya di garis belakang, yaitu sebagai kurir, anggota palang merah dan juga menyelenggarakan dapur umum. Akan tetapi banyak juga kaum wanita yang berjuang menggunakan senjata. Pada waktu itu keadaan kota Yogyakarta yang telah terkepung rapat oleh tentara Belanda, mereka dengan penuh keberanian menyamar sebagai pedagang sayur untuk menyelundupkan senjata dan kebutuhan pejuang lainnya. Kaum wanita sebagai pedagang sayur adalah umum, maka pihak tentara Belanda tidak mencurigainya. Pejuang wanita itu sekali-sekali ada yang diperiksa oleh tentara Belanda, tetapi umumnya mereka dapat melewati pos penjagaan tentara Belanda dengan selamat.

Pada masa perang kemerdekaan Indonesia, semangat nasionalisme dan patriotisme pemuda-pemudi Indonesia yang secara sukarela bergabung dalam PMI, mereka saling bahu-membahu dengan pemuda pemudi yang melakukan perlawanan bersenjata melawan satuan bersenjata Belanda yang akan mengembalikan kekuasaannya menjajah Indonesia yang telah merdeka. Mereka yang tidak mengambil bagian dalam kesatuan bersenjata menggabungkan diri dalam PMI. Pada masa itu pemuda pemudi, pelajar, mahasiswa dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota PMI. Mereka yang telah menggabungkan diri dalam PMI sebelum terjadi perang kemerdekaan kedua, mereka telah dilatih PPPK. Hal itu dilakukan untuk membentuk dan mempersiapkan tenaga MC yang terlatih. Pada masa perang kemerdekaan kedua, bagi mereka yang telah cakap dan terampil serta cukup umur, mereka ditugaskan ke garis depan untuk memberikan pertolongan dan perawatan terhadap pejuang yang sakit dan yang meninggal dunia. Akan tetapi bagi mereka yang belum cukup umur dan belum mempunyai keahlian khusus dalam bidang kesehatan diperbantukan di garis belakang. Di berbagai daerah berkibar bendera tanda palang merah; hal itu sesuai dengan sifat perlawanan dan pertahanan secara total. Semua unsur rakyat dilibatkan dalam perjuangan. Di tiap-tiap laskar yang dibentuk dipersiapkan anggota-anggota PPPK.

Mereka yang secara sukarela bergabung dalam PMI ditugaskan sebagai tenaga kesehatan dalam kesatuan bersenjata, ditugaskan di pos-pos atau poliklinik PMI, membantu juru rawat di rumah sakit, menyelenggarakan dapur umum, dan tugas-tugas lainnya.

Korban pertempuran yang jatuh di sekitar kota Yogyakarta ditolong oleh anggota-anggota PMI Cabang Yogyakarta dengan dibantu anggota PMI Ranting dan Poliklinik-poliklinik PMI yang ada di Yogyakarta. Pertolongan yang dilakukan oleh PMI sifatnya adalah pertolongan pertama. Hal itu dikarenakan terbatasnya tenaga dan peralatan kesehatan yang dimiliki PMI. Apabila anggota PMI tidak bisa menangani korban yang cukup parah, korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat seperti: Bethesda, DKT, PKO, Pugeran.

PMI Cabang Yogyakarta pada masa itu mempunyai satu mobil ambulance dan satu mobil chevrolet yang bentuknya telah dimodifikasi sehingga mirip sebuah mobil truk. Kedua mobil itulah yang menjadi alat pengantar korban dari tempat kejadian ke PMI atau rumah sakit terdekat. Selain mobil-mobil itu setiap regu MC selalu mempunyai tandu untuk mengangkat korban yang jatuh.

Anggota-anggota PMI dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pertolongan dan perawatan pada korban perang di daerah pertempuran tidak dapat berjalan dengan mudah karena korban diambil langsung dari tempat terjadinya pertempuran dan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Korban diangkut dengan menggunakan tandu dan dibawa dengan berjalan kaki menuju tempat yang lebih aman untuk diberi pertolongan dan perawatan. Di dalam usaha memberikan pertolongan dan perawatan pada korban di daerah pertempuran terdapat beberapa anggota PMI yang gugur tertembak tentara Belanda. Pak Amat seorang sopir ambulance PMI menjadi korban tembakan tentara Belanda, ketika Pak Amat bersama dr. Poerwoesodo akan memberikan pertolongan pada korban pertempuran di daerah Demak. Di dalam perjalanan menuju lokasi pertempuran, mobilnya ditembak tentara Belanda. Di dalam peristiwa itu Pak Amat meninggal dunia, sedangkan dr. Poerwoesodo selamat dan mobilnya rusak. Selain itu dua wanita PMI juga gugur tertembak tentara Belanda ketika sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di perbatasan Yogyakarta. Pada masa orang kemerdekaan di Yogyakarta terdapat beberapa anggota PMI yang gugur ketika menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Mereka yang gugur kemudian ada yang dimakamkan di Tmaan Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta.

Anggota-anggota PMI didalam usaha memberikan pertolongan pada korban perang dari daerah pertempuran harus menaggalkan atau menghilangkan pakaian dan perlengkapan yang mempunyai tanda-tanda bahwa korban adalah pejuang. Misalnya baju dan celana hijau, janur, dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan korban dan anggota PMI yang menolongnya dari pemeriksaan tentara Belanda. Ketledoran dalam menghilangkan tanda-tanda tersebut akan berakibat fatal bagi pejuang yang menderita luka-luka karena mereka akan menjadi kemarahan tentara Belanda. Peristiwa tersebut pernah terjadi, ketika anggota PMI Cabang Yogyakarta sedang memberikan pertolongan kepada korban pertempuran di daerah Cebongan, Kabupaten Sleman. Pertempuran yang terjadi di daerah Cebongan membawa korban 17 orang dari pihak pejuang Indonesia. Korban-korban yang pada masa itu masih di Jalan Secodiningratan. Ketika rombongan PMI yang sedang membawa korban pertempuran di daerah Cebongan melewati Jalan Wirobrajan dan kebetulan di daerah itu terdapat pos penjagaan

tentara Belanda. Tentara Belanda merasa curiga dengan adanya rombongan PMI tersebut, maka rombongan PMI diperiksa oleh tentara Belanda. Pada waktu memeriksa korban, tentara Belanda menemukan salah seorang korban yang janurnya belum diperiksa yang kemudian menjadi sasaran kemarahan tentara Belanda. Selanjutnya korban ditembak di tempat.

Keadaan kota Yogyakarta pada waktu pendudukan Belanda pada siang hari seakan-akan tenteram, dan tentara Belanda berani keluar dari pos-pos mereka, namun pada malam hari mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain mempertahankan dari serangan gerilya. Di dalam keadaan demikian, pada pagi harinya tentara Belanda melakukan pembalasan dengan melakukan pembersihan-pembersihan di kampung-kampung sehingga menimbulkan korban dari pihak rakyat.

Tentara Belanda dalam melakukan tindakan-tindakannya tidak segan-segan menembaki rakyat yang dicurigai. Oleh karena itu anggota PMI selain memberikan pertolongan pertama kepada korban pertempuran yang menderita luka-luka yang bertugas mencari korban-korban tembakan antara Belanda. Tentara Belanda setelah melakukan penembakan biasanya terus mengambil dan merawatnya. Oleh PMI Cabang Yogyakarta korban tembakan tentara Belanda yang meninggal dunia kemudian dimakamkan di lapangan Secodiningratan yang letaknya di sebelah selatan Benteng Vrederburg.

Lokasi tersebut merupakan lapangan yang luas dan terdapat parit-parit yang dulunya sebagai pertahanan, dan sekarang telah menjadi bagian dari taman Monumen 1 Maret (Majalah Berita PMI, 1981; Seskoad, 1990)). Di dalam melakukan pemakaman korban yang meninggal dunia karena korban cukup banyak, maka untuk menghemat tempat, satu lobang kubur digunakan untuk memakamkan dua atau tiga mayat. Di dalam memberikan pertolongan kepada korban tembakan tentara Belanda, anggota PMI juga tidak jarang mendapat ancaman dan tekanan dari pihak tentara memberikan pertolongan kepada korban tembakan Belanda di daerah Lempuyangan. Di depan Sekolah Menengah Teknik (SMT) terdapat tiga orang gerilyawan Indonesia yang menyamar sebagai pedagang arang tertangkap tentara Belanda. Setelah diperiksa tentara Belanda mencurigainya dan di dalam karung ditemukan senjata yang akan diselundupkan ke dalam kota. Setelah mengetahui bahwa mereka bukan pedagang biasa melainkan gerilyawan, maka mereka ditembak di tempat oleh tentara Belanda yang memeriksanya. Semua orang dilarang mendekati korban sampai pada pagi harinya tak terkecuali anggota PMI yang akan memberikan perawatan.

Adanya kegiatan yang dilakukan oleh Markas PMI Cabang Yogyakarta itu, tentara Belanda lama-kelamaan menaruh curiga kepada anggota PMI. Markas PMI Cabang Yogyakarta yang berada di Jalan Secodiningratan disuruh pindah oleh tentara Belanda dengan alasan gedung Markas PMI Cabang akan dipakai oleh tentara Belanda, maka PMI Cabang Yogyakarta harus mencari tempat lain untuk kegiatan PMI. Selanjutnya kantor PMI Cabang Yogyakarta menempati gedung asrama Putri SGB, di Jalan Gondokusuman dengan letak hampir berhadapan dengan Markas PMI Pusat. Gedung Markas PMI Pusat terletak di jalan Gondokusuman No. 14 Yogyakarta. PMI Cabang kemudian mendirikan pos utama kegiatan MC di Ndalem Wijilan, rumah Kanjeng Ratu Dewi. Namun situasinya tidak aman, kemudian atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pos utama MC di pindahkan ke Siti Hinggil, Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, selain PMI Cabang, PMI Ranting yang berada di setiap daerah MPP di kota Yogyakarta juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Anggota-anggota PMI yang bergabung dalam PMI Ranting selain memberikan pelayanan kesehatan juga mencari korban-korban tembakan tentara Belanda yang meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia dikubur di pemakaman umum dan yang menderita luka-luka cukup parah dibawa ke Rumah Sakit terdekat.

Obat-obatan yang digunakan oleh anggota PMI untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat berasal dari bantuan luar negeri, maupun persediaan obat-obatan yang masih dimiliki PMI. Bantuan obat-obatan yang bersal dari luar negeri diterima PMI Pusat sebelum terjadi Agresi Militer Belanda yang kedua. Bantuan obat-obatan yang ditujukan ke Yogyakarta diterima PMI Pusat dan untuk selanjutnya dibagikan ke PMI Cabang termasuk PMI Cabang Yogyakarta. Adanya bantuan obat-obatan itu sangat bermanfaat bagi PMI Cabang Yogyakarta karena kesediaan obat-obatan yang ada bertambah dan cukup untuk memberikan pertolongan pada korban perang. Pengiriman obat-obatan pada masa perjuangan dilakukan oleh kurir dengan berjalan kaki. Pada masa perang kemerdekaan kedua, walaupun tidak lengkap obat-obatan itu yang menyertai regu-regu MC dalam memberikan pertolongan pada korban perang. Selain itu, anggota-anggota PMI juga mendapat bantuan dari toko-toko obat, teman, dan sanak saudara yang bekerja di rumah sakit.

Dana untuk mencukupi kebutuhan PMI diperoleh dari sumbangan para dermawan yang bersimpati dengan perjuangan Bangsa Indonesia. Salah seorang diantaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain memberikan bantuan pada PMI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga memberikan bantuan kepada perorangan dan keperluan pasukan gerilya untuk melawan Belanda. Selama lebih kurang enam bulan dalam keadaan perang, setiap orang merasakan kesukaran-kesukaran karena mendapat tekanan-tekanan dari tentara Belanda, demikian juga terhadap anggota PMI, tetapi hal itu tidak dapat mematahkan semangat anggota PMI untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Pihak Belanda melakukan tekanan-tekanan karena mereka menganggap bahwa setelah Yogyakarta diduduki dan pemimpin-pemimpin negara tertangkap amka Negara RI sudah tidak ada lagi. Di dalam suatu negara yang berdaulat hanya ada satu perhimpunan Palang Merah dan Belanda hanya mengakui NERKAI sebagai perhimpunan Palah Merah di Indonesia serta beranggapan bahwa PMI merupakan perhimpunan yang tidak sah.

Kesukaran-kesukaran itu bertambah lagi beberapa waktu kemudian dengan terjadinya peristiwa pagelaran, yaitu terjadinya konflik antara Belanda dengan anggota PMI di pos Pagelaran, Keraton Yogyakarta, Peristiwa Pagelaran sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan. Sebelum terjadi peristiwa Pagelaran, di daerah Bintaran telah terjadi konflik antara tentara Belanda dengan gerilyawan Indonesia. Salah satu diantaranya Komandan *Inlichtingen Veiligheids Groep/IVG* (Badan Intelijen Belanda) Kapten Vosveld.

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa itu tentara Belanda mencurigai warga Bintaran, untuk itu mereka mencari ketua RT di Bintaran untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya warga Bintaran yang dicurigai. Ketua RT yang dicari tentara Belanda adalah RM. Soetisno yang kebetulan juga sebagai Ketua MC PMI Cabang Yogyakarta. Mereka mencari RM. Soetisno di Dalam

Adinegaran, tetapi tidak ditemui kemudian mereka meneruskan mencari di Pos PMI Pagelaran, Keraton Yogyakarta. Pos PMI di Pagelaran merupakan pos utama kegiatan MC PMI Cabang Yogyakarta. Di pos ini setiap hari pengurus PMI mengadakan penjagaan selama jam kerja, sedangkan penjagaan selanjutnya dilanjutkan oleh anggota MC secara bergilir selama 24 Jam. Pada sore hari tanggal 5 Februari 1949 pos OMI di Pagelaran didatangi empat orang tentara Belanda, mereka adalah Komanda IVG Kapten Vosveld, seorang tentara berpangkat Sersan Mayor dan dua orang Opsir untuk mencari RM. Soetisno. Ketika tentara Belanda sedang memeriksa anggota MC, salah seorang diantaranya mengetahui bahwa di Siti Hinggil, Pagelaran Kraton Yogyakarta sebelah timur terdapat gerilyawan yang bersembunyi sehingga terjadi konflik antara Belanda dengan gerilyawan yang bersembunyi di Pagelaran. Adanya peristiwa tersebut pihak tentara Belanda menuduh bahwa PMI menyediakan tempat bersembunyi bagi para gerilyawan. Di dalam perkiraan Belanda, gerilyawan yang bersembunyi dalam jumlah yang banyak, tetapi sebenarnya hanya empat orang dan sore itu juga mereka lari meninggalkan Siti Hinggil (Majalah Suara PMI, 1978).

Pada masa perang kemerdekaan selalu terjalin hubungan antara Komandan Wehrkreise III, Letnan Kolonel Soeharto dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman, pimpinan PDRI di Sumatra, Sri Sultan Hamengkubuwono IX maupun dengan pemimpin-pemimpin lainnya di dalam memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia. Sri Sultan memberikan dukungan yang sangat besar terhadap kegiatan perjuangan. Melalui kakaknya GBPH Prabuningrat dijalin hubungan antara Komandan Wehrkreise III dengan pihak Kraton. Sri Sultan memberikan kesempatan kepada para pejuang dalam kota untuk bermarkas di Purboyo, Keraton (Roem, 2011).

Keraton merupakan daerah aman karena disegani Belanda, tentara Belanda memang mencurigai Keraton. Tetapi mereka tidak mau mengambil resiko menyerbu Keraton, hal itu memberikan keuntungan besar bagi TNI. Untuk itu banyak gerilyawan yang bersembunyi di lingkungan Keraton Yogyakarta. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antara anggota PMI dengan tentara Belanda. Pihak Belanda menuduh, bahwa PMI memberikan bantuan pada gerilyawan Indonesia baik dalam bidang kesehatan, makanan, perlindungan, juga membantu gerilyawan dari front luar kota.

Setelah terjadi konflik antara tentara Belanda dengan gerilyawan yang bersembunyi di lingkungan pagelaran sebelah timur, maka pada malam harinya anggota PMI yang berjaga juga meninggalkan Pagelaran menuju Polik klinik Dalem Ngabean, Ngadirusryan di sebelah barat alun-alun Kidul. Mereka tetap di polik klinik menunggu sampai adanya tindakan dari pengurus PMI. Pada esok harinya tanggal 5 Februari 1949, dengan atas nama anggota PMI, Ketua PMI Cabang Yogyakarta dr. Poerwohesodo menyerahkan diri kepada Belanda. Pengurus PMI yang lainnya, seperti M. D. Ali Sastro dan teman-temannya datang ke Ngabean. Mereka meminta agar MC yang berjaga pada tanggal 5 Februari 1949 menjelaskan peristiwa itu kepada *Inlichtingen Veligheide Groep* (IVG). Selanjutnya mereka ditawan selama dua minggu, setelah diperiksa tentara Belanda kemudian empat orang dilepaskan dan dua orang lainnya tetap ditahan dan dipindahkan ke penjara Wirogunan bersama-sama dr. Poerwohesodo. Kedua anggota MC yang ditawan itu adalah Ketua MC PMI Cabang Yogyakarta RM. Soetisno dan

Simbolon. Dari penjara Wirogunan kedua tawanan IVG tersebut dipindahkan ke Ambarawa. Kedua tawanan itu sebenarnya telah diputus hukuman mati oleh pengadilan Belanda dengan tuduhan memberi bantuan pada gerilyawan Indonesia baik dalam bidang kesehatan, makanan, perlindungan, juga membantu gerilyawan dari front luar kota. Akan tetapi hukuman itu tidak dilaksanakan dan mereka dibebaskan akhir bulan Desember 1949, setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

PMI pada tahun-tahun pertama terbentuknya sudah menghadapi persoalan dalam negeri yang begitu berat, yaitu mendapat tekanan-tekanan dari pihak Belanda yang terus-menerus mendesak kedudukan Pemerintah RI dan PMI Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan Agresi Militer II, Kota Yogyakarta diduduki, para pemimpin negara ditawan, demikian juga pemimpin dan anggota PMI baik Pusat maupun Cabang Yogyakarta juga ada yang ditawan tentara Belanda (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Di dalam usaha untuk membebaskan anggotanya yang ditawan tentara Belanda, pengurus PMI mengajukan permintaan kepada pihak Belanda untuk membebaskan mereka karena mereka sangat dibutuhkan untuk usaha kepalangmerahan. PMI Cabang Yogyakarta yang dipimpin oleh dr. Poerwohusodo selama bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Mei 1949 telah memberikan pertolongan pada korban perang di daerah Yogyakarta dan sekitarnya yang terdiri dari, yaitu pertolongan kepada korban yang meninggal 175 orang, dan pertolongan kepada korban yang menderita luka-luka 246 orang.

Selain harus menangani peristiwa-peristiwa di Yogyakarta, PMI Cabang Yogyakarta juga mengirimkan anggota-anggotanya untuk ikut memberikan pertolongan kepada korban perang yang bertempur di luar daerah kota Yogyakarta. Korban dari pusat pertempuran dikirim ke PMI Cabang Yogyakarta bagian evakuasi yang menempati gedung bekas Hodel Splendit di Jalan Gondolayu, Yogyakarta. Di dalam tugasnya PMI banyak bekerjasama dengan Badan Pertolongan Keluarga Korban Perang (BPKKP). PMI bertugas di daerah pertempuran untuk memberikan pertolongan kepada korban, sedangkan BPKKP bertugas di garis belakang untuk menerima dan mengurus korban.

Setelah terjadinya peristiwa Pagelaran, maka pos utama kegiatan MC yang berada di Pagelaran, Keraton Yogyakarta kemudian dipindahkan dan dijadikan satu dengan markas PMI Cabang Yogyakarta di gedung Asrama Putri di Jalan Gondokusuman Yogyakarta. Markas PMI Cabang Yogyakarta tetap di gedung asrama putri itu sampai dengan saat PMI Pusat kembali ke Jakarta. Kemudian Markas PMI Cabang Yogyakarta menempati bekas gedung Markas PMI Pusat di Jalan Gondokusuman No. 14 Yogyakarta.

### **Aktivitas PMI Cabang Yogyakarta pada Waktu Sekitar Timbang Terima dari Nerkai Kepada PMI**

Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dengan berhasil menduduki kota selama enam jam telah membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada, bahkan masih mempunyai kemampuan untuk menyerang tentara Belanda. Juga jelas dari laporan-laporan yang masuk bahwa inisiatif penyerangan sudah beralih dari pihak tentara Belanda ke pihak TNI (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Jalan buntu di bidang militer untuk menguasai kembali Indonesia dibarengi dengan ancaman Amerika Serikat mencabut *Marshall Plan* (European Recovery Program yang merupakan program pembangunan kembali ekonomi yang rusak akibat perang dunia II dengan bantuan yang cukup besar dari Amerika atas saran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Geprge Marhsall di Harvard University), serta desakan dari dunia internasional akhirnya memaksa Belanda kembali ke jalan diplomatik melalui perundingan dengan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai persetujuan antara kedua belah pihak. Di dalam perundingan itu delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Mohammad Roem, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh DR. Van Royen. Kedua delegasi dalam perundingan itu membacakan pernyataan masing-masing yang kemudian terkenal dengan sebutan *Roem-Royen Statment*. Sehubungan dengan persetujuan itu, maka pada tanggal 29 Juni 1949 Belanda telah selesai menarik pasukannya dari Yogyakarta. Setelah penarikan pasukan Belanda dari Yogyakarta selesai, pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan pemimpin-pemimpin negara lainnya yang ditawan di Banka kembali di Yogyakarta. Pada tanggal 9 Juli 1949 Mr. Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai ketua PDRI kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Setelah semua pemimpin RI berkumpul di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet RI yang pertama sejak adanya Agresi Militer Belanda II. Pada kesempatan itu MR. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada wakil preside Mohammad Hatta. Di dalam sidang kabinet diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Koordinator Keamanan (Kementerian Penerangan RI, 1949).

PMI sebagai badan penolong bekerja untuk memberikan pertolongan kepada sesama umat manusia dalam segala keadaan. Setelah kembalinya pemerintahan RI di Yogyakarta, situasi kota Yogyakarta dalam keadaan aman. Untuk itu PMI mulai memusatkan perhatiannya sebagai badan penolong yang bekerja dalam situasi damai. PMI Cabang Yogyakarta dalam situasi damai ikut berpartisipasi dalam membenahi masalah-masalah yang harus segera diselesaikan oleh bangsa Indonesia yang baru memperoleh kemerdekaan. Tugas-tugas yang menjadi perhatian PMI Cabang Yogyakarta setelah kembalinya pemerintah RI di Yogyakarta adalah: masalah-masalah sosial yang ditimbulkan akibat adanya perang kemerdekaan yang memerlukan bantuan PMI. Kegiatan-kegiatan PPPK yang dilakukan pada perang kemerdekaan tetap dilanjutkan. DI dalam usaha untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di luar kota Yogyakarta. PMI Cabang Yogyakarta pada periode ini memperbanyak pos-pos kesehatannya. Pos-pos kesehatan PMI itu didirikan di gedung-gedung sekolah yang berada di sepanjang jalan raya yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan daerah luar kota, misalnya di speanjang jalan antara kota Yogyakarta-Wates, Yogyakarta-Magelang, Yogyakarta-Prambanan, Yogyakarta-Bantul, dan sebagainya.

Tenaga sukarela sebagai tenaga utama dalam PMI sudah terbentuk sejak awal berdirinya PMI. Ketika PMI dibentuk tenaga sukarela yang terdiri dari pemuda pemudi, pelajar, mahasiswa itu pada masa perang kemerdekaan bertugas memberikan pertolongan kepada korban perang di daerah pertempuran. Pelajar itu terdiri dari pelajar-pelajar SD, SMP, SMA, yang pada waktu itu sudah ada di Kota Yogyakarta. Misalnya perguruan Taman Siswo, Muhammadiyah, Bopkri, dan sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas negeri

maupun sekolah kejuruan yang sudah ada pada waktu itu di Yogyakarta, murid-muridnya sebagian besar ikut berjuang baik di garis depan maupun digaris belakang. Bagi mereka yang bergabung di PMI dan dapur umum saling bahu-membahu dengan pemuda pemudi lainnya yang berjuang dengan senjata.

Pada masa perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan jasa PMI tidak terkira besarnya. Pertempuran-pertempuran melawan musuh yang persenjataannya lebih kuat dan modern telah banyak mengakibatkan korban jiwa yang jatuh. Berkat adanya kegiatan PMI banyak korban pertempuran yang dapat diselamatkan dan sebagian dari mereka dapat kembali ke medan pertempuran. Penderitaan rakyat yang menjadi korban pertempuran dari serangan tentara Belanda telah dapat dikurangi berkat adanya pertolongan PMI. Pada masa revolusi kemerdekaan terlihat adanya hubungan yang erat antara PMI, TNI, dan rakyat.

Perang gerilya diikuti oleh sebagian besar rakyat yang bersama-sama TNI saling bahu-membahu untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. Rakyat banyak yang bergabung dalam persatuan-kesatuan bersenjata maupun yang bertugas di dapur umum dan di palang merah. Mengingat luasnya pekerjaan PMI ada masa itu, maka banyak orang datang untuk meminta pertolongan kepada PMI dan banyak pula datang untuk memberikan bantuan TNI. Dasar-dasar palang merah yang tidak membeda-bedakan bangsa, politik, agama, kepercayaan, maupun golongan dapat memudahkan pekerjaannya di dalam memberikan bantuan di mana saja. Hal itu sesuai dengan pendapat Profesor Dr. Satrio sebagai salah satu tenaga penggerak Penolong Korban Perang (PKP) pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia: "sejak kelahiran dan pertumbuhannya, sudah terjalin kemanunggalan antara PMI dengan Angkatan Perang dan rakyat. Istiwma sekali dalam tubuh PKP yang merupakan bibit dari korps sukarela PMI."

Adapun dalam situasi damai mereka memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban kecelakaan dan bencana alam, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai dengan bunyi Anggaran Tahun 1949, bab III, pasal 3, ayat (1) dan (2). Adanya penambahan pos-pos PMI yang berada di sepanjang jalan raya di perbatasan kota Yogyakarta itu menggunakan tenaga-tenaga PMI yang sudah ada dengan dibantu oleh murid-murid yang gedung sekolahnya digunakan sebagai pos-pos PMOI. Pos-Pos PMI yang baru didirikan itu juga berfungsi sebagai tempat latihan PPPK bagi kader-kader PMI.

PMI adalah suatu perhimpunan yang dibentuk oleh masyarakat dalam melaksanakan tugasnya turut membantu pemerintah dengan sukarela di bidang kemanusiaan sebagai pengamalan Pancasila (PMI, 1986). Telah menjadi tujuan PMI untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama mengenai usaha-usaha kesehatan sosial, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. PMI bertugas memberikan pertolongan pada masyarakat yang terkena musibah kecelakaan dan bencana alam yang sifatnya mendadak dan belum ditangani oleh pihak atau instansi yang bersangkutan, misalnya instansi kesehatan, dan sosial. Setelah instansi yang bersangkutan menangani musibah tersebut dan PMI sifatnya hanya membantu. Untuk itu PMI harus mempunyai tenaga-tenaga yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi jumlah, kemampuan, maupun kesadaran bekerja. Di dalam usaha untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas anggotanya, PMI Cabang Yogyakarta mengadakan pendidikan, latihan dan

pembinaan PPPK bagi anggota PMI serta warga kampung yang berada di sekitar kota Yogyakarta.

Di dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang PPPK bagi masyarakat umum, Markas Besar PMI yang pada waktu itu masih bermarkas di Jalan Gondokusuma No. 14 Yogyakarta, menerbitkan dan menjual buku panduan PPPK bagi masyarakat. Buku itu sengaja dijual dengan harga murah agar terjangkau oleh masyarakat dan sengaja diiklankan di surat kabar harian Nasional pada tanggal 21 Desember 1949. Dasar untuk mencapai kesadaran bekerja yang diharapkan adalah "Sukarela". Suka dalam menyumbangkan tenaga, rela dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diharapkan setiap anggota PMI di dalam melaksanakan tugasnya akan bersungguh-sungguh tanpa mengharap balasan.

Masalah-masalah sosial akibat adanya perang kemerdekaan II masih tetap menjadi prioritas utama yang dikerjakan oleh anggota PMI Cabang Yogyakarta. Pada masa perang kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang yang gugur ketika melakukan perlawanan bersenjata terhadap pihak tentara Belanda, Jepang, maupun Sekutu dan dikuburkan di berbagai tempat. Setelah perang kemerdekaan selesai. Untuk menghormati jasa-jasa mereka yang telah gugur, pihak pemerintah yang dibantu PMI dan masyarakat mencari dan menggali kubur mereka untuk selanjutnya dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Di dalam rangka pemindahan kerangka jenazah para pejuang yang telah gugur pada masa perang kemerdekaan itu juga terdapat beberapa kerangka jenazah anggota PMI yang ikut dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Antara lain pak Amat seorang sopir Ambulance PMI yang telah gugur ketika akan memberikan pertolongan korban pertempuran di daerah Demak Ijo. Ketika itu pak Amat dengan dr. Poerwohesodo di dalam perjalanan menuju lokasi ditembak oleh tentara Belanda di depan gedung BNI 46, Jalan Akhmad Dahlan Yogyakarta. Di dalam peristiwa itu pak Amat meninggal dunia dan dr. Poerwohesodo selamat. Jenazah Pak Amat pada waktu itu dimakamkan di lapangan Secodiningratan. Di dalam mencari dan mengenali kerangka Pak Amat tidak terlalu sulit karena Pak Amat mempunyai ciri-ciri berambut keriting. Selain itu, di daerah Cebongan juga terdapat anggota PMI yang digali kembali kuburnya untuk dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta.

Pada waktu Yogyakarta menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan RI, maka pemimpin-pemimpin negara dan rakyat banyak berdatangan ke Yogyakarta, sehingga dalam waktu singkat penduduk kota Yogyakarta dan sekitarnya jumlahnya bertambah banyak. Setelah perang kemerdekaan berakhir dengan adanya persetujuan *Roem-Royen*, maka para pengungsi yang datang dari daerah pendudukan Belanda ke Yogyakarta mulai kembali ke daerah asalnya. Seperti daerah Semarang, Surabaya, Jakarta, dan daerah lainnya. Untuk itu PMI Cabang Yogyakarta juga turut membantu pemulangan mereka.

Diberitakan oleh Aneta, bahwa pada tanggal 7 Juni 1949 telah didaftar 45.000 orang yang akan mengungsi kelaur Yogyakarta. Mereka itu 17.400 orang Tionghoa, 7.900 pegawai Belanda dengan keluarganya dan 19.700 orang lain-lainnya. Hingga tanggal 25 Juni 1949 telah diangkut 25.000 orang dan diperkirakan dalam satu minggu lagi pengungsian dapat selesai (Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 9 Juni 1949).

Sehubungan dengan adanya persetujuan *Roem-Royen* pada tanggal 7 Mei 1949 kemudian pernyataan *Roem-Royen* diterima oleh kabinet RI pada tanggal 14 Juli 1949. Oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) kemudian diatur persiapan untuk menghadapi Konferensi Meja Bunda (KMB). Untuk menghadiri KMB di Den Haag, delegasi RI dipimpin oleh wakil presiden Mohammad Hatta. KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 Nopember 1949, yang menghasilkan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Undang-Undang Dasar Sementara RIS diterima pada tanggal 14 Desember 1949, kemudian pada 17 Desember 1949 memilih Presiden dan Wakil Presiden. Presiden RIS terpilih adalah Ir. Soekarno dan Wakil Presiden RIS terpilih adalah Drs. Mohammad Hatta dan dilantik di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta (Roem, 1982).

Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun Belanda diadakan upacara-upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS atas wilayah bekas Hindia Belanda selain Irian Barat. Di dalam naskah persetujuan KMB, masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian. Di negara Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen dan ketua delegasi RIS, Drs. Mohammad Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS.

Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil tinggi mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara membubuhkan tanda-tangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS. Adanya pengakuan kedaulatan atas RIS terhadap wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian barat itu, maka dengan demikian berakhilah secara resmi persengkataan antara Belanda dengan Indonesia. Setelah terbentuknya RIS, maka ibu kota negara dan psuat pemerintahan kembali dari Yogyakarta ke Jakarta. Bersamaan dengan dipindahkannya Ibukota dan organisasi lainnya ke Jakarta, Pengurus Besar PMI juga memindahkan Markas Besarnya ke Jakarta. Markas Besar PMI kemudian menempati bekas Kantor *Central Comitter NERKAI* di Jalan Dr. Soetomo No. 8 Jakarta. Perpindahan Markas Besar PMI itu sifatnya adalah perpindahan administratif saja, sedangkan harta benda yang dimiliki Markas Besar PMI yang ada di Yogyakarta kemudian diwariskan kepada PMI Cabang Yogyakarta. Setelah Markas Besar PMI pindah ke Jakarta, gedung bekas Markas Besar PMI kemudian digunakan oleh PMI Cabang Yogyakarta untuk Markas Cabgn PMI (PMI, 1953).

Sesudah Yogyakarta dikembalikan kepada Pemerintahan RI pada bulan Juni 1949 yang kemudian disusul dengan pengakuan kedaulatan RIS atas wilayah Hindia Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka tibalah waktunya adanya penyerahan kekausaan dari berbagai jawatan, lembaga sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Adanya pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada RIS, juga membawa kemajuan bagi PMI. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu negara yang berdaulat hanya terdapat satu perhimpunan palang merah nasional.

Untuk itu NERKAI yang pada masa itu masih ada di Indonesia harus menyerahkan kekuasaannya pada PMI yang sudah dibentuk. Serah terima antara NERKAI dan PMI resmi di tanda tangani di depan akte notaris, pada tanggal 16 Januari 1950. Di dalam serah terima itu NERKAI diwakili oleh; Dr. Barend van Tricht, Mr. Djohan Gustaf Adolf The, Profesor Mr. Mas Slamet, Dr. Kho Tjok Khing, Theodorus Cornelis Andrian Nass. Adapun pihak RIS diwakili oleh; Dr.

Bahder Djohan, Pangeran Bintoro, Dr. Poedjodarmohoesodo. Serah terima antara kedua perhimpunan palang merah itu dihadiri oleh saksi-saksi: Soetrono Prawirodimedjo dan Soemantri Hadisoesilo serta Notaris Kadiman. Tepat pada tanggal 16 Januari 1950 itu juga dengan ketetapan Presiden RIS No. 15 Tahun 1950, PMI disahkan sebagai satu-satunya perhimpunan Palang Merah Nasional di Indonesia (AD/ART PMI, 1986).

Sebagai akibat dari pengoperan itu, dengan sendirinya PMI menginjak suasana baru, dalam arti bahwa tanggung jawab PMI dalam lapangan sosial akan lebih luas dan berat. Untuk itu setelah penyerahan kekuasaan dari NERKAI kepada PMI, maka PMI mulai mengembangkan dan menata diri dalam organisasi kepalang-merahan. PMI Cabang Yogyakarta dalam rangka menata diri dan pengembangan, PMI mulai aktif. Kegiatan-kegiatan dari masing-masing bidang yang sudah dibentuk serta merintis kegiatan-kegiatan yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Pada masa itu PMI Cabang Yogyakarta dijabat oleh dr. Martohoesodo dan kegiatan-kegiatannya dipusatkan di Markas Cabang PMI di Jalan Gondokusuman No. 14 Yogyakarta.

Di dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan pada masyarakat, PMI Cabang Yogyakarta banyak memerlukan dana untuk pembiayaan. PMI Cabang Yogyakarta pada masa itu yang masih lemah dalam organisasi dan keuangan dan agar tidak menggantungkan diri dari pada Pemerintah, PMI mulai mengadakan pencarian dana dari masyarakat.

Kegiatan-kegiatan PMI Cabang Yogyakarta mengalami peningkatan dengan dibentuknya bagian-bagian yang diperlukan bagi PMI. Sebagai perhimpunan yang melaksanakan tugas-tugas kepalang-merahan yang berdasarkan Ketetapan Pemerintahan RIS No. 25 Tahun 1950, PMI di dalam waktu-waktu selanjutnya terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman.

## **Kesimpulan**

Setiap manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki derajat, hak, dan martabat yang sama sejak lahir. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dan wajib saling menolong tanpa membedakan bangsa, politik, agama, atau golongan, baik dalam keadaan damai maupun perang. Setelah Indonesia merdeka, rakyat masih berperang melawan tentara Belanda yang ingin menjajah kembali. Perang Kemerdekaan II terjadi karena Belanda melanggar perjanjian *Renville*, dengan menyerang Ibukota RI, Yogyakarta, dan wilayah lainnya. Banyak korban jatuh selama pertempuran, sehingga pos-pos kesehatan dibutuhkan untuk menolong korban perang. Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) yang terlatih ditugaskan di garis depan untuk memberikan pertolongan, sementara yang tidak memiliki keahlian khusus ditempatkan di garis belakang. Selama Perang Kemerdekaan II, khususnya di Yogyakarta, PMI memainkan peran penting dalam menyelamatkan korban pertempuran melawan tentara Belanda yang memiliki persenjataan lebih canggih. Berkat upaya PMI, banyak korban yang selamat dan beberapa bahkan kembali ke medan perang. PMI berhasil mengurangi penderitaan rakyat yang menjadi korban perang dengan memberikan pertolongan yang sangat dibutuhkan pada saat itu.

## Referensi

- Alit, D. M., Pramarta, N. B., Darman, T. Y., & Wika, N. L. (2021). Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Gejolak Revolusi Fisik di Indonesia. *Social Studies: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*, 9(1), 58-72. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/2698>.
- Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (2022). *Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 Sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dita, I., Wahyuni, A., & Purnomo, B. (2022). Perjuangan dan Kegigihan Syafruddin Prawiranegara dalam Menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 1(1), 123-134. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i1.18507>.
- Kementerian Penerangan RI (1949). *Keterangan Pemerintah Kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diucapkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 19 Juli 1949*. Djakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Ki Nayono (1979). *Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kotabaru Yogyakarta dan Peristiwa-peristiwa Penting di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI 1945*. DIY: Badan Musyawarah Musea.
- Kuntowijoyo, (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maidjah, M. (1976). *Kisah Dokter Gerilya dalam Revolusi Kemerdekaan di Banten*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Majalah Berita PMI No. 1 Tahun X. Jakarta: Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta, 17 September 1981.
- Majalah Suara PMI No. 16, 1978.
- PMI (1953). *Sedjarah PMI 17 September 1945-31 Desember 1952*. Djakarta: Markas Besar PMI.
- PMI Cabang Yogyakarta (1946). *Peringatan satu tahun PMI Tjabang Djogjakarta 29 September 1945-29 September 1946*. Djogjakarta: PMI Cabang Yogyakarta.
- PMI, (1986). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI*. Jakarta: Musyawarah Nasional PMI ke VIV, 22-26 November 1986.
- PMI, (1989). *Himpunan Ceramah dan Tanya Jawab dalam Rangka Hari Ulang Tahun PMI ke-44*. Jakarta: Markas Besar PMI, 13-16 September 1989.
- Putra, K. (1976). *Palang Merah Indonesia*. Bandung: Sangabuana.
- Roem, M. (1982). *Takhta untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Gramidia.
- Roem, M. (2011). *Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia Pustaka Utama.
- Seskoed, (1990). *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta: PT. Lamtoro Gung Persada.

Surat Kabar Harian Al Djihad, tanggal 4 April 1946.

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 25 Januari 1985.

Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 10 Djuni 1949.

Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 15 Oktober 1949.

Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 21 Desember 1949.

Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 27 September 1949.

Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 4 November 1949.

Surat Kabar Harian Nasional, tanggal 9 Djuni 1949.

Susanto, S. (1985). *Perjuangan TP dalam Perang Kemerdekaan II*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tardjo, N. S. S. (1985). *Dari Atas Tandu Pak Dirman Memimpin Perang Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Wiratama 45.

TNI AU, (1984). *Sejarah Bergambar: Catur Windu TNI Angkatan Udara 1945-1977*. Yogyakarta: Dinas Sejarah TNI-AU.